

Jasa Penyelenggara Pesta dan Katering



Beberapa model pakaian pengantin yang dipajang salah satu stan pameran di Java Mall, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (12/1/2025). Pameran yang diikuti pengusaha jasa pernikahan, desainer pakaian, gedung pertemuan, dan hotel ini menawarkan jasa untuk penyelenggaraan acara dan pesta. Mereka menawarkan beragam konsep yang menarik untuk konsumen.

Diwacanakan Tahun Ini, Apa Kabar "Tax Amnesty" Jilid III?

Pengampunan pajak bisa saja mendatangkan dana instan bagi negara. Namun, program itu juga dapat merusak utuhawa pemerintah dan menjuburkan praktik pengemplangan pajak.

Agnes Theodora

Sebelum tahun 2024 berakhir, DPR dan pemerintah sempat beres-beres meninjau kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kini, tahun sudah berganti. Pemerintah sedang "pusing-pusingnya" mencari sumber penerimaan baru di kala kinerja pajak masih serot. Apakah amnesty pajak akan di-judikan kembali?

Gagasan soal program pengampunan pajak yang diusulkan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat tenggelam di tengah ingar-bingar polemik kenaikan tarif PPN sepanjang akhir tahun lalu. Awal tahun ini, wacana itu kembali muncul ke permukaan lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Menurut Budi, pemerintah sedang meninjau kembali program pengampunan pajak jilid III. Program itu disebut-sebut akan menjadi solusi untuk mengembalikan aset dan devisa negara, khususnya dari kasus korupsi besar.

Budi melampar pernyataan tersebut dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pengawasan Korupsi dan Tala Kelola di Kejaksaan Agung pada 2 Januari 2025. Ia menyebut, wacana program pengampunan pajak sedang dirumuskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Ini salah satu mekanisme

yang sedang disiapkan untuk memberi ruang, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden kepada mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, melalui program tax amnesty," kata Budi saat itu. Wacana untuk menghidupkan kembali program pengampunan pajak tersebut mendapat respons beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas sebagai penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, misalnya, menilai wacana program pengampunan pajak tersebut terlalu terburu-buru untuk dibahas.

Mentoring anggota DEN, Chatib Basri, saat ini masih terlalu dini untuk membahas opsi menghidupkan kembali program amnesty pajak. Ia pun enggan berkomentar terlalu jauh. "Saya kira terlalu cepat untuk memicarakan mengenai tax amnesty saat ini. It's too early (terlalu dini). Itu, kan, sebenarnya pembahasannya (amnesty) masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Kalau informasinya sudah lebih jauh, baru kita bisa bicara," kata Chatib dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Sementara itu, anggota DEN lainnya, Arief Anshory Yusuf, dengan tegas menyatakan tidak sepakat jika program pengampunan pajak dilakukan sampai berjilid-jilid. Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2022, program serupa pernah digelar dua kali di bawah pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah bahkan telah berkomitmen tidak akan mengesampingkan lagi pengampunan pajak. Arief menilai, program pengampunan pajak yang dilakukan berkali-kali justru akan menyuburkan praktik pengemplangan pajak. "Tax amnesty itu tidak kredibel kalau dilakukan lebih dari sekali. Jika seperti itu, it will def the purpose (itu akan bertentangan dengan tujuannya). Orang bisa-bisa bakal ngemplong pajak karena tahu suatu saat bakal ada tax amnesty lagi," katanya saat dibahas, Minggu (12/1).

DEN belum secara resmi memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk tidak menyalakan pengampunan pajak jilid III. Akan tetapi, Arief meyakini, pemerintah tidak akan menempuh cara tersebut mengingat konsekuensinya akan menciderai utuhawa pemerintah sebagai otoritas pajak. "Jadi, saya tidak yakin (pengampunan pajak) akan dilakukan," ucap Arief.

Dilemas

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono beranggapan, opsi program pengampunan pajak jilid III bisa saja muncul ketika negara membutuhkan dana secara "instan" dari wajib pajaknya. Apalagi, saat ini kinerja penerimaan pajak memang tidak sebaik seperti yang diprediksikan ekonomi global dan landainya perekonomian dalam negeri. Penerimaan pajak pada tahun 2024 kembali mencatatkan shortfall atau gagal mencapai target setelah empat tahun terakhir selalu berhasil mencapai target. Data Kementerian Keuangan, realisasi setoran pajak sepanjang tahun lalu sebesar Rp 1.924,4 triliun atau hanya 97,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun.

"Kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan memang biasanya menjadi alasan klasik mengapa ada tax amnesty. Pemerintah membutuhkan dana yang lebih banyak untuk menggerakkan rasio pajak yang sudah bertahun-tahun tak kunjung meningkat," kata Prianto.

Ia menilai, melalui program amnesty pajak, pemerintah memang dapat menista para pengemplang pajak untuk mengadu dan mengungkap kecurangan pembayaran pajaknya selama ini dengan mengesampingkan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran pajak. Cara lain lebih mudah ditempuh untuk menyerap pemasukan dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) serta memajukan para pengembang pajak di sektor kebantuan, sebagaimana rencana pemerintah.

"Ini lebih cepat dibandingkan dengan jika pemerintah memilih menegakkan hukum pajak. Sebab, terduga pelaku pengemplang pajak dan penghindar pajak dapat melakukan pelanggaran balik melalui serang-kota yang di peradilan. Tidak efisien jika pemerintah ingin

mendapat dana cepat dari wajib pajak," ujarnya.

Namun, keraguan dari program pengampunan pajak jilid III juga tidak sembarangan. Prianto mengatakan, pengampunan pajak yang terus berulang akan memunculkan rasa ketidakadilan pajak di kalangan wajib pajak yang patuh serta menciderai kredibilitas pemerintah selaku otoritas pajak.

Menyebut "karpis merah" kepada para pengemplang pajak untuk menubus dosa-dosa pajak mereka dengan tarif khusus yang lebih rendah dari sebelumnya akan memunculkan antipati dan mendorong ketidakpatuhan pajak lebih tak kunjung meningkat," kata Prianto.

"Wajib pajak patuh bisa saja memilih untuk tidak perlu patuh lagi karena nantinya, tuh, akan ada tax amnesty jilid berikutnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Drajad Widhono mengatakan, penerapan pengampunan pajak jilid III bisa saja dilakukan, dengan syarat desain dan eksekusinya harus menghindari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengampunan pajak jilid I dan II. Kelemahan dalam pelaksanaan sebelumnya membuat tujuan utama program ini, yaitu memperbaiki basis pajak dan meningkatkan rasio pajak, tidak tercapai. "Buktinya, rasio pajak stagnan, bahkan mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan sekitar dua dekade lalu," kata Drajad yang juga sebagai Ekonom Sustainable Development Indonesia.

WAWANCARA KHUSUS

Baru dan Berkelanjutan, Proyek di Balik Relasi Indonesia-Jepang (I)

Perduta Menteri Jepang Shigeru Iihara dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu di Jakarta, Sabtu (11/1/2025). Kedua pemimpin negara tersebut membahas sejumlah proyek penting guna mempererat hubungan Jepang dan Indonesia.

Salah satunya berupa pinjaman Jepang terhadap Indonesia yang dilera bantuan pinjaman pembangunan ekonomi atau official development assistance (ODA). ODA merupakan pinjaman yang diperganjung oleh Pemerintah Jepang secara langsung untuk negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, bantuan mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bentuknya beragam, dengan besaran pinjaman yang berbeda-beda pula.

Akhirnya berkesempatan mewawancarai Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Ueda Hajime bersama Sekretaris Ketenahanan, Perikanan, dan Konservasi Alam Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Wakubayashi Hajime. Ada pula tim Japan International Cooperation Agency (JICA) ikut bergajung. Perusahaan itu diwakili representasi senior untuk Indonesia, Okamura Kengo. Sebab, empat dari lima proyek yang akan digarap tidak lepas dari amdi JICA.

Serupa jawaban dikutip berdasar penjelasan Ueda, kecuali sejumlah bagian kawasan pembangunan ekonomi merupakan kutipan Wakubayashi dan Okamura. Berikut petikan wawancara yang dilasokan pada pekan lalu di kantor Kedutaan Jepang untuk Indonesia.

Proyek apa saja yang disepakati pada Jumat (10/1/2025)?
Tiga proyek pertama ini ialah pembangunan kawasan Patimban di Subang, Jawa Barat, serta pelatihan untuk para pejabat administratif di Indonesia. Pelatihan ini merupakan bagian dari proyek bantuan pengembangan resmi (ODA) dari Jepang untuk Indonesia yang ditanjanggani kesepakatiannya pada Jumat (10/1).

Mengenai Pelabuhan Patimban, saat ini sedang dalam tahap pembangunan di sisi timur Jakarta. Kami tengah menggarap proyek ini dengan tujuan membangun Indonesia sebagai hub ekspor otomotif, khususnya mobil-mobil.

Bagian yang utama, kami tengah menanti untuk memiliki kapasitas ekspor mencapai 600.000 mobil per tahun di Patimban, setelah menuntaskan proyek ekspansi ini. Angka itu setara dengan 150 persen dari total volume ekspor mobil-mobil di Indonesia untuk saat ini. Jadi, pembangunan itu cukup signifikan.

Kini, kapasitas ekspor sebesar 200.000 mobil sehingga angkanya akan naik tiga kali lipat. Itulah pentingnya proyek ini untuk membuat Indonesia sebagai hub ekspor untuk mobil-mobil. Tidak hanya eksklusif untuk mobil-mobil Jepang, kami juga terbuka untuk mobil-mobil Indonesia, Korea, dan China.

Perubahan Patimban sendiri tidak hanya sebagai terminal mobil, tetapi juga terminal kontainer. Kami sedang membangunnya dalam beberapa tahun ini.

Dari sejumlah perubahan, mengapa Anda memilih Patimban?

Sebab, kami memiliki begitu banyak kawasan industri di sisi timur Jakarta, seperti Karawang dan area-area industri lain di mana para produsen mobil memiliki pabrik-pabriknya sendiri. Jarak dari kawasan industri produsen mobil ke Tanjung Priok, begitu pula dengan jarak terhadap Patimban hampir sama. Saya dapat kalahan bahwa perubahan ini lokasi yang strategis. Guna memubuatnya lebih strategis, kami tengah membangun akses jalan untuk mempercepat perjalanan transportasi dari kawasan industri ke Patimban. Sebab, Patimban berada di kawasan rami. Ada jalur truk dari timur ke barat. Kami tengah membangun akses jalan ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sehabian telah tuntas, sebagian lagi sedang dalam pengerjaan.

Proyek kedua mengenai peningkatan kapasitas SDM. Seperti apa rencana konkretnya?

Proyek kedua berupa pelatihan bagi para pejabat administratif, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, termasuk wilayah terpinggirkan seperti Indonesia Timur dan Kalimantan Utara. Dengan proyek ini, kami akan melatih 7.240 orang. Kami akan melatih mereka, baik di Jepang maupun Indonesia. Angkanya meningkat dibandingkan dengan proyek sebelumnya.

Sebelumnya, kami telah melatih sekitar 4.500 orang sejak 1990. Rata-rata ada 100 orang yang dilatih per tahun. Dengan proyek baru ini, kami akan melatih lebih dari 7.000 orang selama 7 tahun ke depan. Artinya, tiap tahun sekitar 1.000 orang dilatih. Jadi, ini merupakan lompatan besar dari 100 orang ke 1.000 orang, sekitar delapan kali lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

Upaya ini untuk mempromosikan pembangunan kapasitas pemerintah pusat dan daerah di Indonesia guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lebih tinggi. Hal ini sekaligus sebagai usaha berkontribusi terhadap penilaian pencapaian bagi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Banyak kolega dari ragam kementerian, seperti Kementerian Keuangan, telah meminta usul di Jepang. Beberapa berpartisipasi dalam program ini, ada pula berdasarkan proyek besarnya, dan sebagainya. Saya amat bangga bahwa para kolega dapat belajar dan mendapatkan pelatihan di Jepang. Agar berkeseluruhan prioritas pemerintahan Bapak Prabowo, saya rasa pembangunan SDM merupakan salah satu agenda utamanya. (YOSIPTA DEBIRINA RATHI PUSPARIKA)



Ueda Hajime

OTONOTIF

Penjualan Mobil 2024 Melampaui Target Gaikindo

Dinamika penjualan kendaraan road empat meoraki tertentu memariki pasar otomotif dalam negeri sepanjang 2024. Penjualan mobil secara nasional di 2024 melampaui target asosiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo sebesar 850.000 unit.

Gaikindo mencatat, penjualan mobil dari pabrik ke dealer (wholesales) sebanyak 865.723 unit sejak Januari hingga Desember 2024. Jumlah mobil yang dijual dealer kepada konsumen (retail sales) mencapai 889.680 unit pada periode sama. Dari jumlah tersebut, total penjualan mobil kategori low cost green car (LCGC) atau kendaraan hemat energi dan harga terjangkau sebanyak 176.766 unit mobil atau mencapai 20 persen total penjualan wholesales.

Mobil merek BYD untuk pertama kali berada di Indonesia pada Juni tahun lalu dengan jenis kendaraan listrik. Dalam acara peresmian markasunya BYD di Indonesia di Jakarta, Kamis (18/1/2024), tiga model mobil diperkenalkan, yaitu BYD Dolphin yang berbentuk hatchback, BYD Atto 3 yang berbentuk crossover SUV kompak, dan BYD Seal yang berbentuk sedan. Hingga akhir Desember, terdapat total 15.429 kendaraan merek BYD.

2023 tentang Perubahan Peraturan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao menyampaikan, pihaknya memariki mobil-mobil energi baru dengan mencakup 50 outlet eS (cool, service, spare part) di kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, mobil mewah merek Perancis, yakni Peugeot, tak lagi dipasok ke dealer sejak Mei 2024. Grup Astra selaku importir dan distributor merek tersebut menginformasikan penghentian penjualan Peugeot di Indonesia (Kompas.com, 2/3/2024). Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesales mobil merek tersebut di 2023 mencapai 199 unit, lalu menjadi hanya sebanyak 27 unit di 2024.

Merek mobil mewah yang masuk Indonesia sejak 1972 itu terakhir meluncurkan produk tahun 2023. Astra dalam situasinya menyampaikan, sampai tahun tersebut, kegiatan penjualan terfokus pada kendaraan series Alure yang eksklusif dilengkapi series Active sebagai varian kendaraan yang lebih terjangkau.

Head of Corporate Communication Astra Boy Kelana Soehroto dalam kerangkaannya, Jumat (10/1/2025), mengatakan, mereka sebagai pemasok kendaraan di pasar domestik berharap tahun 2025 ini akan ada berbagai katalis positif yang mampu menjaga daya beli masyarakat.

"Dengan demikian, agar dapat mendorong pertumbuhan pertumbuhan otomotif nasional, kami juga berharap agar dapat terus mempertahankan posisi pangsa pasar kami," ujarnya. Berdasarannya, penjualan wholesales mobil di bawah Astra masih mengonasi pasar dengan 482.964 unit mobil atau 56 persen sepanjang tahun lalu, seperti di 2023. Merek-merek yang mereka jual ialah Toyota dan Lexus. Di bawah Isuzu, UD Trucks, dan Peugeot. Di luar itu, merek mobil Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai, Wuling, Chery, BYD, dan lainnya terjual ke dealer sebanyak 282.759 unit pada 2024. (DESIKA KURNIA)

PT. GENERAL ENERGY BALI
PENGUMUMAN TENDER: AGENT PENJUALAN TIKET PESAWAT
No: 001/048/ATS/2025
PT General Energy Bali mengundang agen penjualan tiket pesawat yang memiliki syarat untuk menggarap penjualan tiket pesawat layanan penumpang kelas First dan Business Class yang berlatar waktu minimal sebulan yang terdapat dalam bidang penjualan tiket, harga yang kompetitif, dan dukungan penjualan.